

ARTIKEL ILMIAH

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT TAMBUSAI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Pendidikan Strata-1 pada Program Studi Akuntansi
dan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

OLEH:

MUHAMMAD AL IKHSAN
NIM: 1224041



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
ROKAN HULU
2016**

Surat Pernyataan Sumber Tulisan Artikel Ilmiah

Saya yang menandatangani surat pernyataan ini:

Nama : Muhammad Al Ikhsan

NIM : 1224041

- 1) Menyatakan bahwa artikel ilmiah yang saya tuliskan benar bersumber dari kegiatan penelitian/perencanaan yang telah dilakukan sendiri oleh penulis bukan oleh pihak lain.
- 2) Naskah ini belum pernah diterbitkan/dipublikasikan dalam bentuk prosiding maupun jurnal sebelumnya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa paksaan pihak manapun juga untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pasir Pengaraian, 01 Juli 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Al Ikhsan
NIM.1224041

Pembimbing I,

Hj. Fitriyati Is, SE.MM
NIDN. 1012027301

Menyetujui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sri Yuhawati, M.Acc
NIDN.1009018501

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENUNGGAKAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT TAMBUSAI

Muhammad Al Ikhsan
Hj. Fitriyati Is¹
Nurhayati²
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pasir Pengaraian
Email: alikhsan446@gmail.com
2016

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pajak kendaraan bermotor di Samsat Tambusai. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh persamaan regresi berganda $Y=10,225-0,039X_1+0,152X_2+0,158X_3+1,19$. Sedangkan hasil analisis uji t diperoleh kesimpulan bahwa variabel faktor ekonomi (x_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,544 < 1,976$. Variabel kualitas pelayanan pajak (x_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,903 < 1,976$. Variabel pemahaman wajib pajak (x_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,687 < 1,976$. Hasil uji f menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel faktor ekonomi, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap penunggakan pajak dengan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $4,220 > 2,670$.

Kata kunci : Penunggakan pajak, faktor ekonomi, kualitas pelayanan pajak, pemahaman wajib pajak.

Abstrack

The objective of this study is to analyze the factors which will affect the motto vehicle tax arrears on Samsat Tambusai. The results showed that the linear regression equation is $Y=10,225-0,039X_1+0,152X_2+0,158X_3+1,19$. According result of t test showed that variable economic factors (X_1) is not significant effect on motto vehicle tax arrears with $t < t_{table}$ that is $-0,544 < 1,976$. Variable quality of tax services (X_2) is not significant effect on motto vehicle tax arrears with $t < t_{table}$ that is $1,903 < 1,976$. Variable understanding of the taxpayer (X_3) is not significant effect on motto vehicle tax arrears with $t < t_{table}$ that is $1,687 < 1,976$. The result of f test show that simultaneously variable economic factors, Variable quality of tax services and Variable understanding of the taxpayer are significant affect to the motto vehicle tax arrears with $f > f_{table}$ that are $4,220 > 2,670$.

Keywords: Motto vehicle tax arrears, economic factors, quality of tax services, understanding of taxpayer.

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting yang menopang program pembangunan dan bersumber dari dalam negeri. Oleh karena pajak sangat menentukan besar kecilnya kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin, maka dibutuhkanlah serangkaian upaya agar meningkatkan objek maupun subjek pajak yang ada.

Pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu penyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Mengingat pentingnya pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor, maka sudah sewajarnya jika setiap individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Beberapa upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak, meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan serta didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil.

Samsat Tambusai terletak di Jalan Tuanku Tambusai, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Dengan adanya pusat pelayanan dan tempat pembayaran pajak di Tambusai, merupakan suatu kemudahan bagi wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu lagi meluangkan waktu ke Pasir Pengaraian untuk membayar pajak. Hal ini diharapkan dapat menekan jumlah penunggakan pajak. Seperti pada data yang diperoleh secara langsung dari Samsat Tambusai, terdapat penunggakan pajak selama tahun 2014 dan 2015 terlihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Data Tunggakan Penerimaan PKB Samsat Tambusai Tahun 2014-2015

Tahun	Jumlah WP penunggak PKB	Penerimaan Pajak
2014	114 WP	Rp. 7.250.634.276
2015	96 WP	Rp. 7.909.037.367

Sumber: Lap. Keuangan Samsat Tambusai.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak yang menunggak mengalami penurunan pada dua tahun terakhir. Seperti pada tahun 2014 penunggakan yang terjadi sejumlah 114 wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan tahun 2015 mengalami penurunan hingga 96 wajib pajak. Sementara penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami kenaikan cukup besar yakni dari tahun 2014 Rp. 7.250.634.276 naik menjadi Rp. 7.909.037.367 ditahun 2015.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada Samsat Tambusai yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Kelurahan Tambusai Tengah, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, dengan objek penelitian penunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Tambusai.

Data yang digunakan adalah laporan mengenai data tunggakan dan penerimaan serta jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Tambusai ditahun 2014 dan 2015. Sedangkan data primer diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada 147 orang responden, yang mana keseluruhan dari responden merupakan wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan bermotornya ditahun penelitian. Kuesioner yang ditujukan kepada responden terdiri dari 20 pertanyaan mengenai penunggakan pajak dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut antara lain faktor ekonomi, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman wajib pajak.

Adapun teknik analisis data digunakan adalah analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dengan uji t dan uji f. Analisis regresi linear berganda adalah suatu model linear regresi yang variabel terikatnya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas. Pengujian hipotesis uji t merupakan pengujian yang dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Sedangkan uji f dilakukan untuk

pengujian koefisien regresi secara bersama-sama dengan hasil pengujian berpengaruh signifikan atau tidak beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat.

3. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Waluyo (2013:2) mengatakan bahwa pajak adalah iuran negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk pembangunan.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Resmi (2014), adalah sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgeter* (sebagai sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgeter*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

(PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi *Regulerend* (sebagai pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

Pengertian Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak daerah yang dipungut pemerintah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pendapatan asli daerah yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak kendaraan bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekar secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT5 (lima Gross Tonnage). Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah:

1. Kereta api.
2. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbale balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah.
4. Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Subjek Pajak

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pengertian Tunggakan Pajak

Pengertian tunggakan pajak menurut Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas (2006:1) menyatakan bahwa tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan menurut Siti Resmi (2014), tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkan ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang

sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding (SKPPB).

Faktor-Faktor Penunggakan Pajak

Penunggakan pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak tak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain:

1. Faktor Ekonomis

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) sebagaimana dikutip oleh Johanes (2011), menyatakan bahwa masyarakat tidak akan menemui kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya kalau nilai yang harus dibayar itu masih dibawah penghasilan yang sebenarnya mereka peroleh secara rutin. Faktor ekonomi merupakan hal yang sangat fundamental dalam hal melaksanakan kewajiban. Masyarakat yang miskin akan menemukan kesulitan untuk membayar pajak. Kebanyakan mereka akan memenuhi kebutuhan hidup terlebih dahulu sebelum membayar pajak. Karenanya, tingkat penghasilan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajiban perpajakannya.

2. Kualitas pelayanan pajak

Selain itu kualitas pelayanan perpajakan turut mempengaruhi perilaku wajib pajak didalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi wajib pajak berhubungan dengan kualitas pelayanan yang diberikan. Pelayanan kepada wajib pajak dikatakan bermutu bila memenuhi atau melebihi harapan wajib pajak atau semakin kecil kesenjangannya antara pemenuhan janji dengan harapan pelanggan adalah semakin mendekati ukuran bermutu.

Menurut Hesti (2013), untuk mengukur kepuasan atas pelayanan digunakan instrumen *service quality* yang terdiri dari :

- a. Bukti fisik (*tangibles*), berfokus pada barang atau jasa yang menyangkut penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal dan alat komunikasi.
- b. Keandalan (*reability*), yaitu pemenuhan pelayanan segera dan memuaskan, keandalan mencakup kemampuan

memberikan jasa secara akurat sesuai dengan yang dijanjikan.

- c. Daya tanggap (*responsiveness*), yaitu kemampuan karyawan untuk membantu konsumen menyediakan jasa dengan cepat sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen. Keaktifan pemberian pelayanan dengan cepat dan tanggap.
- d. Keyakinan (*Assurance*) yaitu, Pengetahuan dan kemampuan karyawan untuk melayani dengan ramah dan sopan.
- e. Empati (*Empathy*), yaitu perhatian yang diberikan karyawan secara individual kepada konsumen dan mengerti kebutuhan konsumen.

3. Tingkat pemahaman pajak oleh wajib pajak Pancawati Hardiningsih (2011) mengemukakan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan beban pajak yang mereka tanggung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian analisis ini akan membahas mengenai bentuk lembaran jawaban responden

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.225	1.198		8.537	.000
Faktor Ekonomi	-.039	.070	-.058	-.554	.581
Kualitas pelayanan pajak	.152	.080	.202	1.903	.059
Pemahaman pajak	.158	.094	.164	1.687	.094

terhadap seluruh konsep yang diukur. Dalam penelitian ini variabel diukur berdasarkan pada penilaian responden atas setiap item pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner. Dalam hal ini responden diminta penilaiannya mengenai pengaruh faktor ekonomi, kualitas pelayanan

pajak dan pemahaman pajak terhadap penunggakan pajak kendaraan bermotor.

Analisis regresi linear berganda

Analisis regresi linear berganda adalah suatu model linear regresi yang variabel terikatnya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas. Regresi linear berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas antara lain faktor ekonomi, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman pajak. Sedangkan yang merupakan variabel terikatnya adalah penunggakan pajak.

Persamaan regresi linear berganda yang diperoleh menggunakan program SPSS 17,0 dengan nilai α sebesar 5% ditunjukkan oleh tabel berikut:

**Tabel 1.2 Hasil SPSS
Nilai Koefisien Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10.225	1.198		8.537	.000
Faktor Ekonomi	-.039	.070	-.058	-.554	.581
Kualitas pelayanan pajak	.152	.080	.202	1.903	.059
Pemahaman pajak	.158	.094	.164	1.687	.094

Dengan demikian diperoleh persamaan regresi linear berganda $Y = 10,225 - 0,039X_1 + 0,152X_2 + 0,158X_3 + 1,198$.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial variabel bebas berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui signifikansi hubungan antar variabel-variabel tersebut dilakukan pengujian menggunakan program statistik SPSS 17,0. Berikut hasil analisis SPSS yang telah dilakukan:

Tabel 1.3 Hasil uji t dengan SPSS

Sumber: Data olahan SPSS

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 sebesar -0,554, variabel X_2 sebesar 1,903, dan variabel

X_3 sebesar 1,687 dimana nilai t_{tabel} sebesar 1,976. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,544 < 1,976$. Variabel X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu

$1,903 < 1,976$. Variabel X_3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,687 < 1,976$.

Uji f

Uji f merupakan uji koefisien regresi secara bersama-sama dengan hasil pengujian berpengaruh signifikan beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian menggunakan tingkat signifikan 0,05. Untuk hasil uji f dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4 Hasil SPSS

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	106.671	3	35.557	4.220	.007 ^a
Residual	1204.798	143	8.425		
Total	1311.469	146			

Sumber: data olahan program SPSS

Dari hasil analisis diatas maka nilai f_{hitung} sebesar 4,220 dengan tingkat signifikan 0,007 dengan df 1 (jumlah variabel -1) = 3, dan df 2 ($n-k-1$) = $147-3=144$. Dengan demikian diperoleh hasil f table sebesar 2,67. Maka diketahui bahwa $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $4,22 > 2,67$, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Tambusai” dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari jawaban responden wajib pajak kendaraan bermotor menunggak yang terdaftar di Samsat Tambusai terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penunggakan pajak kendaraan bermotor antara lain faktor ekonomi, kualitas

pelayanan pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak.

2. Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh persamaan regresi berganda $Y=10,225-0,039X_1+0,152X_2+0,158X_3+1,19$. Persamaan ini menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi pada variabel penunggakan pajak disisi lain variabel ekonomi menurun dan variabel kualitas pelayanan pajak dan pemahaman pajak meningkat.
3. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa nilai t_{hitung} untuk variabel X_1 (faktor ekonomi) sebesar -0,554, variabel X_2 (kualitas pelayanan pajak) sebesar 1,903, dan variabel X_3 (pemahaman wajib pajak) sebesar 1,687 dimana nilai t_{tabel} sebesar 1,976. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel X_1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y dengan nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-0,544 < 1,976$. Variabel X_2 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,903 < 1,976$. Variabel X_3 tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $1,687 < 1,976$.
4. Berdasarkan hasil uji f maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel faktor ekonomi, kualitas pelayanan pajak dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap penunggakan pajak dengan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}$ yaitu $4,220 > 2,670$.

Saran

Dari uraian sebelumnya, berikut terdapat saran yang membangun dari peneliti agar dapat dijadikan masukan dan pertimbangan oleh instansi terkait dalam hal ini Samsat Tambusai:

1. Diharapkan bagi petugas pajak di Samsat Tambusai agar dapat lebih memaksimalkan kualitas pelayanan perpajakan. Untuk mendukung kemauan dan kesadaran para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
2. Diharapkan bagi petugas pajak agar senantiasa membantu memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar utang pajaknya.
3. Agar sosialisasi mengenai manfaat pajak dan juga pentingnya membayar pajak

dilakukan ditengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak. Hal ini akan membantu menumbuhkan kesadaran dan kemauan wajib pajak.

4. Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup variabel penelitian agar pengetahuan dan wawasan mengenai perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor menjadi lebih luas.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Augusty, Ferdinand. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chandra, Hesti. 2013. *Pengaruh Kepuasan atas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*. Jakarta: Kencana.
- Hardiningsih, Pancawati. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Semarang: Universitas Stikubang Semarang.
- Johanes, Henki. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*. Tegal: Universitas Pancasakti.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Riau No.31 Tahun 2014 Tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.26 Tahun 2014 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Rantung, Vanessa Tatiana dan Hari Priyo Adi. 2009. *Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Pratama Salatiga)*. Makalah Simposium Nasional Perpajakan II.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Perpajakan No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.